

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa. Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0-2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa. Meskipun demikian di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat.

Jawa Tengah terletak koordinat 5° 40' dan 8° 30' Lintang Selatan dan antara 108° 30' dan 111° 30' Bujur Timu (termasuk Kepulauan Karimunjawa). dengan luas wilayah 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

2.1.2 Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 33.774 ribu jiwa terdiri atas 17.023 laki-laki dan 16.751 perempuan. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (1,781 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (1,695 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1.636 juta jiwa).

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

No.	Kab/Kota	Pria	%	Wanita	%	Jumlah
1.	Cilacap	849,09	50%	845,64	49,90%	1.695
2.	Banyumas	817,38	50%	818,53	50,04%	1.636
3.	Purbalingga	443,92	49%	454,46	50,59%	898
4.	Banjarnegara	451,8	50%	450,03	49,90%	902
5.	Kebumen	590,09	50%	594,79	50,20%	1.185
6.	Purworejo	350,39	49%	360	50,68%	710
7.	Wonosobo	394,01	51%	383,11	49,30%	777
8.	Magelang	624,97	50%	620,52	49,82%	1.245
9.	Boyolali	474,52	49%	489,17	50,76%	964

No.	Kab/Kota	Pria	%	Wanita	%	Jumlah
10.	Klaten	568,78	49%	590,02	50,92%	1.159
11.	Sukoharjo	428,17	50%	436,04	50,46%	864
12.	Wonogiri	461,31	49%	487,71	51,39%	949
13.	Karanganyar	423,52	49%	432,68	50,53%	856
14.	Sragen	430,72	49%	448,31	51,00%	879
15.	Grobogan	668,51	49%	682,92	50,53%	1.351
16.	Blora	419,38	49%	432,73	50,78%	852
17.	Rembang	308,62	50%	310,55	50,16%	619
18.	Pati	597,31	48%	635,58	51,55%	1.233
19.	Kudus	409,31	49%	421,99	50,76%	831
20.	Jepara	592,48	50%	595,81	50,14%	1.188
21.	Demak	553,87	50%	564,03	50,45%	1.118
22.	Semarang	491,82	49%	509,07	50,86%	1.001
23.	Temanggung	373,8	50%	372,02	49,88%	746
24.	Kendal	477,68	51%	464,61	49,31%	942
25.	Batang	371,07	50%	372,02	50,06%	743
26.	Pekalongan	434,18	50%	439,81	50,32%	874
27.	Pemalang	637,92	50%	650,66	50,49%	1.289
28.	Tegal	708,30	50%	716,59	50,29%	1.425
29.	Brebes	895,21	50%	886,17	49,75%	1.781
30.	Kota Magelang	59,51	49%	61,28	50,73%	121
21.	Kota Surakarta	249,11	49%	263,11	51,37%	512
32.	Kota Salatiga	89,93	49%	93,89	51,08%	184
33.	Kota Semarang	834,12	49%	866,99	50,97%	1.701

No.	Kab/Kota	Pria	%	Wanita	%	Jumlah
34.	Kota Pekalongan	148,22	50%	148,18	49,99%	296
35.	Kota Tegal	121,88	50%	124,24	50,48%	246
Jumlah Penduduk		16.751	50%	17.023	50,40%	33.774

Sumber : <http://jateng.bps.go.id>

Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengar dan Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,5% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun).

Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%).

2.1.3 Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan

dan 8.490 desa/kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten.

Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).

2.2 Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Pada mulanya Dinas Perikanan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Perikanan Darat dan Perikanan Laut. Perikanan Darat pada tahun 1950 disebut juga *Banner Is Ray* yang berkantor di Jalan Kepodang. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1960. Perikanan Darat dipimpin oleh R. Moerdoko pindah kantor di Jalan Empu Tantular No. 2 Semarang. Tahun 1961 sampai dengan tahun 1971 dipimpin oleh R.M. Samiroen.

Jawatan Perikanan Laut pada tahun 1950 bertempat di Jalan Imam Bonjol 134 Semarang. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1960 Perikanan Laut dipimpin oleh R.W.M. Soebroto. Pada tahun 1960 sampai tahun 1970 jawatan Perikanan Laut

dipimpin oleh Soekarjo Karto Wirejo. Soekarjo Karto Wirejo digantikan oleh Soeyadi Siswohardjoyo dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1971.

Pada tahun 1972 Perikanan Darat dan Jawatan Perikanan Laut digabung dengan nama Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Soeyadi Siswohardjoyo bertempat di Jalan Imam Bonjol No.134 Semarang. Masa kepemimpinan Djoko Setyajit, tepatnya pada tahun 2001 Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nama menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001.

Sejalan dengan berputarnya waktu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nama tepatnya pada saat kepemimpinan Ir. Galih Rasiono, M.Pi. Awalnya bernama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, berubah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.134 Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Bapak Ir. Lalu M Syafriadi, M.M sejak 2 Agustus 2013 sampai sekarang.

Dengan adanya Susunan Organisasi Tata Kerja (STOK) yang baru, terbentuklah 25 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang diantaranya terdiri dari 10 (sepuluh) Pelabuhan Perikanan Pantai, 4 (empat) Laboratorium Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, 4 (empat)

Balai Perbenihan dan Budidaya Air Payau dan Laut, 7 (tujuh) Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar.

2.3 Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

2.3.1. Visi

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah “Terwujudnya Sektor Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah yang Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Adapun penjelasan dari visi tersebut adalah:

1. **Tangguh**, mengandung arti bahwa sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan melalui peningkatan pendapatan dan penguatan kelembagaan pemerintah sektor Kelautan dan Perikanan.
2. **Mandiri**, mengandung arti bahwa sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah diharapkan mampu mendukung kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, sistem distribusi, dan jaminan keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya ikan.
3. **Berdaya Saing**, mengandung arti bahwa sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah diharapkan mampu menghasilkan produk dan jasa dengan daya saing tinggi, mempunyai nilai tambah (Value Added) dan Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage).

4. **Berkelanjutan**, mengandung arti bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah akan tetap memperhatikan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta menghindari rusaknya sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2.3.2. Misi

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Tangguh
 - a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan pembudidaya ikan.
 - b. Penguatan Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
2. Mandiri
 - a. Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya.
 - b. Mewujudkan perbaikan system distribusi dan jaminan keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya ikan.
3. Berdaya Saing
 - a. Mewujudkan produk kelautandan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing serta memiliki nilai tambah.
 - b. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.
 - c. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

4. Berkelanjutan

- a. Mewujudkan peningkatan daya dukung lahan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. Mewujudkan kelembagaan masyarakat pengawas yang berperan dalam kegiatan pengawasan.

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;

- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- 6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.5. Lokasi dan Wilayah Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah semua lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan se - Jawa Tengah, yang terdiri dari :

- a. 10 Pelabuhan Perikanan Pantai
 - 1) PPP Karimunjawa
 - 2) PPP Tasikagung
 - 3) PPP Bojomulyo
 - 4) PPP Wonokerto
 - 5) PPP Klidang Lor
 - 6) PPP Morodemak
 - 7) PPP Asemtoyong
 - 8) PPP Tegalsari

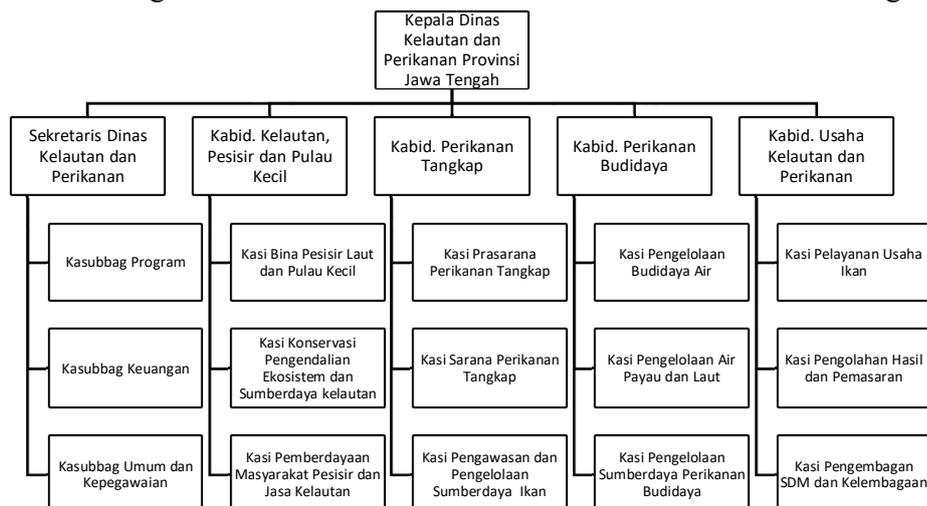
- 9) PPP Tawang
- 10) PPP Pasir
- b. 7 Balai Perbenihan dan Budidaya Air Tawar
 - 1) Ngrajek
 - 2) Janti
 - 3) Muntilan
 - 4) Ambarawa
 - 5) Singosari
 - 6) Tambaksogra
 - 7) Randudongkal
- c. 4 Balai Perbenihan dan Budidaya Air Payau
 - 1) Karimunjawa
 - 2) Sluke
 - 3) Karanganyar Tugu
 - 4) Maribaya
- d. 4 Laboratorium Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
 - 1) Semarang
 - 2) Pekalongan
 - 3) Cilacap
 - 4) BKKI

2.6. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Kekuatan utama birokrasi ada kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara sangat efisien, sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang diciptakan bisa menimbulkan konflik-konflik subunit, karena tujuan-tujuan unit fungsional dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Kelemahan besar lainnya adalah ketika ada kasus yang tidak sesuai sedikit saja dengan aturan, tidak ada ruang untuk modifikasi karena birokrasi hanya efisien sepanjang karyawan menghadapi masalah yang sebelumnya telah mereka hadapi dan sudah ada aturan keputusan terprogram yang mapan. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan

Penjelasan Struktur Organisasi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahkan:

- 1) Subbagian Program: memiliki 6 pegawai ASN dan 4 pegawai non ASN yang bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.
- 2) Subbagian Keuangan: memiliki 9 pegawai ASN dan 4 pegawai non ASN bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian: memiliki 13 pegawai ASN dan 19 pegawai non ASN Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

c. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki 7 pegawai ASN mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan, serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan.

d. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap memiliki 7 pegawai ASN mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap, sarana perikanan tangkap dan pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan.

e. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya memiliki 11 pegawai ASN mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, pengelolaan budidaya air payau dan laut, serta pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya.

f. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan memiliki 11 pegawai ASN mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha perikanan, pengolahan hasil dan pemasaran, dan pengembangan SDM serta kelembagaan.